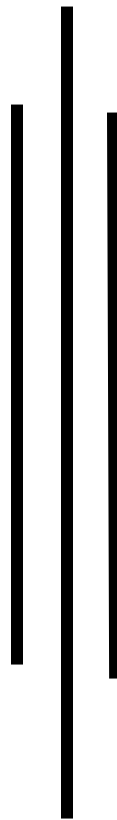




PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl.Raya Candi 107 – Sidoarjo Telp.(031) 8941114 Fax.(031) 8946950

**LAPORAN RENCANA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SIDOARJO**





## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH dan Surat Edaran Bupati Sidoarjo tanggal 10 Februari 2023 Nomor : 050/1310/438.6.1/2023 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Dengan harapan hasilnya menjadi lebih baik dan terukur, sehingga akan menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang aman, nyaman, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Sidoarjo serta memberikan pelayanan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Seiring dengan perkembangan zaman, peningkatan pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan serta pola kehidupan masyarakat dalam kepatuhan berkendara khususnya angkutan barang dan orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Sidoarjo.

Akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dapat disusun.

Sidoarjo, Juni 2023  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SIDOARJO

**BENNY AIRLANGGA Y, SH., MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19690220 199403 1 005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, dari dasar tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tanggung jawab yang luas yaitu :

- a. Menyusun rencana, analisis, pembinaan, monitoring dan evaluasi program Perhubungan..
- b. Melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas dan manajemen angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi daerah dan melaksanakan rencana yang ditetapkan.

Sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi Pelayanan.

Peningkatan pelayanan sektor perhubungan di Kabupaten Sidoarjo, keselamatan transportasi darat serta Penerangan jalan Umum merupakan salah satu dari pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengantisipasi permasalahan transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidak seimbangan antara peningkatan kendaraan dengan sarana pendukung sehingga perlu pemikiran dalam lajan keluar yang disebabkan antara lain kemacetan maupun pola kehidupan masyarakat dalam berkendara terutama kendaraan angkutan barang dan orang.

Sehingga Rencana Kegiatan tahun Anggaran 2024 peningkatan pelayanan Bidang Perhubungan baik perlengkapan jalan maupun sarana dan prasarana perhubungan menjadi perhatian serius dan keselamatan

angkutan darat di Sidoarjo menjadi indikator utama oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, disamping itu sasaran penunjang dengan meingkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan juga perlu diperhatikan.

Namun ada beberapa kendala yang menjadi perhatian Dinas Perhubungan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain :

- Kurang tercukupinya rambu-rambu lalu lintas pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan dan belum tersedianya sarana pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas yang memadai.
- Sarana PJU yang masih belum merata di wilayah kabupaten Sidoarjo
- Kondisi terminal dan halte sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Kepatuhan masyarakat (awak angkutan dan penumpang) terhadap Undang-undang Lalu Lintas belum membudaya, oleh sebab itu harus selalu dikembangkan dan diawasi.
- Jaringan transportasi / jaringan trayek belum dapat menjangkau daerah keseluruhan di Kabupaten Sidoarjo.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tatacara ,Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah ( Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312 );
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, ,Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan proses pembangunan dan program kerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Sidoarjo.

Dari beberapa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2024 dapat dirumuskan beberapa isu - isu strategis antara lain :

1. Kemacetan yang masih terjadi di wilayah kabupaten Sidoarjo menjadi program Prioritas Bupati.
2. Pengadaan dan pemasangan PJU ( Penerangan Jalan Umum ) di wilayah Kabupaten Sidoarjo masih belum merata,
3. Belum optimalnya pelayanan baik itu dari segi infrastruktur perhubungan maupun fasilitas keselamatan lalu lintas.
4. Belum optimalnya pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengamanan sistem transportasi.

Tujuan penyusunan Dokumen awal Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ini memberikan gambaran kepada masyarakat apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan baik itu menyangkut pendanaan maupun rencana lokasi dan juga kendala yang dihadapi sehingga nantinya masyarakat menjadi paham. Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program pengelolaan pelayaran;
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

#### **1.4 Sistematika Renja - SKPD**

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **RENJA – PD**

#### **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program Kegiatan

#### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V : PENUTUP**

#### **LAMPIRAN :**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

**A. Evaluasi pencapaian program kegiatan tahun Lalu**

**Tabel.1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Lalu**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	17.289.705.560,00	16.603.214.888,00	96,03
2	Program penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	124.964.671.107,00	117.932.626.341,00	94,37
3	Program pengelolaan Pelayaran	24.059.780,00	22.179.000,00	92,18
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.593.975.580,00	3.574.292.204,00	99,45

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari sub kegiatan antara lain :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki nilai capaian sebesar 100 %
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki nilai capaian sebesar 99,99 %
  3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki nilai capaian sebesar 96,17 %
  4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD memiliki nilai capaian sebesar 100 %
  5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran memiliki nilai capaian sebesar 100 %
  6. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD memiliki nilai capaian sebesar 97,40 %
  7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan memiliki nilai capaian sebesar 97,68 %
  8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki nilai capaian



- sebesar 90,42 %
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor memiliki nilai capaian sebesar 99,93 %
  10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan memiliki nilai capaian sebesar 98,86 %
  11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan memiliki nilai capaian sebesar 100 %
  12. Penyediaan Bahan/Material memiliki nilai capaian sebesar 99,91 %
  13. Fasilitasi Kunjungan Tamu memiliki nilai capaian sebesar 99,68 %
  14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki nilai capaian sebesar 79,92 %
  15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki nilai capaian sebesar 97,79 %
  16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat memiliki nilai capaian sebesar 100 %
  17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki nilai capaian sebesar 95,16 %
  18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki nilai capaian sebesar 98,13 %
  19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memiliki nilai capaian sebesar 98,13 %
  20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki nilai capaian sebesar 98,92 %
  21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki nilai capaian sebesar 77,97 %

Dari nilai capaian sub kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 96,03 %

II. Program penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari sub kegiatan, antara lain :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota memiliki nilai capaian sebesar 94,53 %
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan memiliki nilai capaian sebesar 95,51 %
3. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C memiliki nilai capaian sebesar 99,62 %
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal memiliki nilai capaian sebesar 99,37 %

5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) memiliki nilai capaian sebesar 97,84 %
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C memiliki nilai capaian sebesar 74,66 %
7. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik memiliki nilai capaian sebesar 80,23 %
8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memiliki nilai capaian sebesar 98,58 %
9. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memiliki nilai capaian sebesar 100,00 %
10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memiliki nilai capaian sebesar 97,74 %
11. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota memiliki nilai capaian sebesar 99,84 %
12. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas memiliki nilai capaian sebesar 92,08 %
13. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin memiliki nilai capaian sebesar 100 %
14. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ memiliki nilai capaian sebesar 96,26 %
15. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum memiliki nilai capaian sebesar 72,32 %
16. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki nilai capaian sebesar 90,05 %

Dari nilai capaian sub Kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 94,37 %

III. Program Pengelolaan Pelayaran, terdiri dari sub kegiatan, antara lain :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki nilai capaian sebesar 92,18 %

Dari nilai capaian sub kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 92,18 %.

IV. Program Pengelolaan Perkerataapian, terdiri dari sub kegiatannya antara lain:

1. Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringananya Kewenangan Kabupaten/Kotamemiliki nilai capaian sebesar 99,45 %

Dari nilai capaian s u b kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 99,45 %.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota  
Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo  
Periode Pelaksanaan Tahun 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten:

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 3 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 3 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun ... (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	92	17.055.252.025	92		92 %	17.055.252.025	-	2.269.870.050	-	-	-	-	-	-	-	2.269.870.050	92	33.434.172.713	100	95,88	
		Keg. Perencanaan, Pengannggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	8	1.409.714			8	1.409.714		0,00	-	-	-	-	-	-				118.138.710		95,98	

		Kinerja Perang kat Daerah	yang tersusun																					
		Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perang kat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	4 Dokumen	753.220			4 Dokumen	753.220		0,00	-	-	-	-	-	-		0,00		57.575.350		96,27	
		Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD yang Tersusun	4 Laporan	656.494			4 Laporan	656.494		0,00								0,00		6.846.100		72,81	
.		Keg. Administrasi Keuangan Perang kat Daerah	Prosentase laporan keuangan sesuai ketentuan dan tepat	100 Persen	12.266.069.929			100 Persen	12.266.069.929		1.688.586.130,00	-	-	-	-	-	-		1.688.586.130,00		23.189.258.462		97,00	

			waktu																				
		Sub Keg. Penyed iaan Gaji dan Tunjan gan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Oran g/ Bula n	12.2 65.5 25.2 32			89 Oran g/ Bula n	12.2 65.5 25.2 32		1.7 81. 691 .13 3	-	-	-	-	-	-		1.7 81. 691 .13 3		23.1 76.7 54.8 62		97,0 0
		Sub Keg. Koordin asi dan Pelaksa naan Akunta nsi SKPD	Jumlah Laporan akutansi dan keuanga n yang tersusun	1 Doku men	544. 697			1 Doku men	544. 697		0,0 0	-	-	-	-	-	-		0,0 0		7.20 8.30 0		100, 00
		Keg. Adminis trasi Barang Milik Daerah pada Perang kat Daerah	Prosent ase barang milik daerah yang tere-gris tasi	60 Pers en	100. 000. 000			60 Pers en	100. 000. 000		0,0 0	-	-	-	-	-	-		0,0 0		97,4 04.2 61		97,4 0
		Sub Keg. Penga manan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokume n Pengam anan barang milik Dearah SKPD	1 Doku men	100. 000. 000			1 Doku men	100. 000. 000		0,0 0	-	-	-	-	-	-		0,0 0		97.4 04.2 61		97,4 0
		Keg. Adminis	Prosent ase	100 Pers	1.18 8.43			100 Pers	1.18 8.43		103 .89	-	-	-	-	-	-		103 .89		2.58 0.73		92,3 5

		trasi Umum Perang kat Daerah	kecukup an kebutuh an umum perangk at Daerah	en	5.297			en	5.297		7.140							7.140		7.149			
		Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	107.431.292			4 paket	107.431.292		0,00	-	-	-	-	-	-	0,00		639.365.529		95,36	
		Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket yang disediakan	1 paket	329.600.000			1 paket	329.600.000		52.050.000	-	-	-	-	-	-	52.050.000		671.515.000		99,74	
		Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	2 paket	28.750.000			2 paket	28.750.000		1.249.800	-	-	-	-	-	-	1.249.800		374.457.900		99,18	
		Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perunda	7 dokumen	8.922.000			7 dokumen	8.922.000		860.000	-	-	-	-	-	-	860.000		12.675.000		92,90	



		dan Peraturan Perundang-undangan	ng-undangan yang disediakan																			
		Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	3 paket	24.243.424			3 paket	24.243.424	0,00	-	-	-	-	-	-		0,00		109.499.847		94,91
		Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	1.350.000			12 laporan	1.350.000	4.475.000,00	-	-	-	-	-	-		4.475.000,00		33.402.500		99,74
		Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	688.138.681			12 Laporan	688.138.681	49.737.340.000	-	-	-	-	-	-		49.737.340.000		739.821.373		81,24
		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	25 Unit	261.220.185			25 Unit	261.220.185	0,00	-	-	-	-	-	-		0,00		231.766.076		97,79

		Urusan Pemerintah Daerah																					
		Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan / Mesin yang disediakan	25 Unit	261.220.185			25 Unit	261.220.185		0,00	-	-	-	-	-	-		0,00		231.766.076		97,79
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhnya jasa penunjang perkantoran	100 Persen	2.883.116.800			100 Persen	2.883.116.800		478.308.510	-	-	-	-	-	-		478.308.510		5.279.452.846		93,17
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	5.000.000			12 Laporan	5.000.000		5.000.000,00	-	-	-	-	-	-		5.000.000,00		9.000.000,00		100,00
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	429.000.000			12 Bulan	429.000.000		98.079.070								98.079.070		725.641.890		89,92

		Listrik yang disediakan																					
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.449.116.800			12 laporan	2.449.116.800		375.229.440	-	-	-	-	-	-		375.229.440		4.544.810.956		93,70
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen	355.000.000			100 Persen	355.000.000		50.318.460	-	-	-	-	-	-		50.318.460		1.324.260.309		97,71
		Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan yang dipelihara serta pelunasan pajak kendaraan dinas /Operasional	50 Unit	250.000.000			50 Unit	250.000.000		50.318.460	-	-	-	-	-	-		50.318.460		485.510.680		95,79

		Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an																					
		Sub Keg. Pemeli haraan Peralat an dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralata n / Mesin yang dipelihar a	40 Unit	105. 000. 000			40 Unit	105. 000. 000		0	-	-	-	-	-	-	0		607. 004. 705		99,4 2	
		PROG RAM PENYE LENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKU TAN JALAN (LLAJ)	Prosent ase kendara an wajib uji yang memenu hi persyara tan teknis dan laik jalan	80 Pers en	102. 604. 274. 866			80 Pers en	102. 604. 274. 866		11. 084 .03 8.1 15	-	-	-	-	-	-	11. 084 .03 8.1 15		117. 932. 626. 341		75,6 9	
			Prosent ase Pelayan an / pengelol aan Terminal Penump ang Tipe C	72.5 Pers en				72.5 Pers en				-	-	-	-	-	-						
			Prosent ase	75 Pers				75 Pers				-	-	-	-	-	-						

			perengkapan jalan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	en				en															
		Keg. Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	Jumlah jenis perengkapan jalan yang berfungsi dengan baik	2 Jenis	92.5 96.1 44.6 73			2 Jenis	92.5 96.1 44.6 73		10.471 .90 0.8 93	-	-	-	-	-	-		10.471 .90 0.8 93		105.674. 028. 790		94,7 6
		Sub Keg. Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	Jumlah Perengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	848 Unit	18.8 62.6 62.5 92			848 Unit	18.8 62.6 62.5 92		0	-	-	-	-	-	-		0		81.8 81.5 81.9 86		94,5 3
		Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan	Jumlah Perengkapan jalan di wilayah Kab. Sidoarjo yang dipelihar	800 Unit	73.7 33.4 82.0 81			800 Unit	73.7 33.4 82.0 81		10.471 .90 0.9 83	-	-	-	-	-	-		10.471 .90 0.9 83		23.7 92.4 46.8 04		95,5 7

	Jalan	a																				
	Keg. Pengelolan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Penumpang Tipe C yang dikelola sesuai Standar	4 Terminal	321.686.800			4 Terminal	321.686.800		11.749.622	-	-	-	-	-	-		11.749.622		921.424.969		93,72
	Sub Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang dipelihara dan direhab	1 Unit	200.000.000			1 Unit	200.000.000		0,00	-	-	-	-	-	-		0,00		218.671.302		97,84
	Sub Keg. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM pengelola terminal tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	121.686.800			15 Orang	121.686.800		11.749.622	-	-	-	-	-	-		11.749.622		299.185.872		85,07
	Keg. Penerbitan Izin Penyelenggara	Jumlah titik parkir tepi jalan	279 titik	136.225.800			279 titik	136.225.800		15.220.640	-	-	-	-	-	-		15.220.640		8.452.818.741		89,73

		aan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	dan area perkantoran / Kawasan lain yang menjadi aset pemda yang dikelola																					
		Sub Keg. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	1 Dokumen	136.225.800			1 Dokumen	136.225.800		15.220.640	-	-	-	-	-	-		15.220.640		8.452.818.741		89,73	

		ha Terintegrasi secara Elektronik	asi secara elektronik																				
		Keg. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Kendaraan bermotor wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	100 Persen	1.278.904.800			100 Persen	1.278.904.800		35.223.840	-	-	-	-	-	-		35.223.840		2.670.883.228		95,68
		Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM Pengujian yang memenuhi standart	18 Orang	303.904.800			18 Orang	303.904.800		35.223.840	-	-	-	-	-	-		35.223.840		421.938.928		99,15
		Sub Keg. Penyed	Jumlah bukti lulus uji	3500 Lem	875.000.000			3500 Lem	875.000.000		875.000.000	-	-	-	-	-	-		875.000.000		1.925.000.000		94,56



		iaan Bukti Lulus Uji Penguji an Berkala Kendaraan Bermotor	yang tersedia	bar			bar		00,00								00,00		0			
		Sub Keg. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji an Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana penguji an kendaraan bermotor yang dipelihara	17 Unit	100.000.000		17 Unit	100.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-		0,00		323.944.300		98,16	
		Keg. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dikeluarkan	2 Dokumen	7.668.605.693		2 Dokumen	7.668.605.693	545.443.120	-	-	-	-	-	-		545.443.120		18.796.785.68		82,45	

		a																				
		Sub Keg. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kot a	jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	100.000.000	0,00	-	-	-	-	-	-		0,00		223.110.081		99,16
		Sub Keg. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa lalulintas	138 Unit	4.173.115.293			138 Unit	4.173.115.293	82.148.960	-	-	-	-	-	-		82.148.960		18.573.675.487		82,28
		Pengawasan	Jumlah Laporan	12 Lapo	3.395.49			12 Lapo	3.395.49	463.29	-	-	-	-	-	-		463.29		463.294.		13,64

		dan Penguasaan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pengendalian Efektivitas pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/kota	ran	0.400			ran	0.400		4.160							4.160		160		
		Keg. Persebaran hasil analisis dampak lalu lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/kota	Prosentase Rekomendasi Andalalin yang dilaksanakan	100 persen	59.750.000			100 persen	59.750.000		0	-	-	-	-	-	-	0		81.421.000		71,73
		Sub Keg. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan	12 Rekomendasi	59.750.000			12 Rekomendasi	59.750.000		0	-	-	-	-	-	-	0		81,421.000		71,73
		Keg. Audit dan	Jumlah Inspeksi yang	8 Laporan	123.007.100			8 Laporan	123.007.100		4.500.000	-	-	-	-	-	-	4.500.000		6.264.649.64		95,72

		Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	dilaksanakan																	4				
		Sub. Keg. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	123.007.100			12 Laporan	123.007.100		4.500.000	-	-	-	-	-	-		4.500.000		260.982.800		74,13	
		Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Jumlah Angkutan Pedesaan yang melakukan perpanjangan kartu pengawas Ijin Trayek	55 Kendaraan	419.950.000			55 Kendaraan	419.950.000		0	-	-	-	-	-	-		0		1.476.219.100		90,12	

		Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
		Sub. Keg. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/kota	Jumlah angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota yang tersedia	28 Unit				28 Unit	419.950.000		-	-	-	-	-	-				1.476.219.100		90,12	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAPIAN	Persentase titik perlintasan kereta api wewenang kabupaten yang telah	49 Persen	4.656.999.200			49 Persen	4.656.999.200	562.285.656	-	-	-	-	-	-				562.285.656		7.168.052.926	100,00

			dibangun fasilitas pengamanan																					
		Keg. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik perlintasan Kereta Api di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dikendalikan	16 Titik	4.65 6.99 9.20 0			16 Titik	4.65 6.99 9.20 0		562 .28 5.6 56	-	-	-	-	-	-		562 .28 5.6 56		7.16 8.05 2.92 6		100,00	
		Perumusan Kebijakan Penetapan jaringan Jalur Kereta Api yang jaringan nya Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan jaringan Jalur Kereta api yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/kota	1 Dokumen	3.74 3.97 5.58 0			1 Dokumen	3.74 3.97 5.58 0		562 .87 9.5 66	-	-	-	-	-	-		562 .87 9.5 66		7.16 8.05 2.92 6		100,00	



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Urusan Perhubungan merupakan urusan yang kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten cukup penting, pada Visi yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”*** dan di misi ke-3 Yaitu ***“Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.”***

Tujuan dari misi Ketiga tersebut adalah:

**”Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan”** dengan Indikator : **“Indeks Infrastruktur”**. Untuk mencapai Misi dan Tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah: **“Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata”** dengan Indikator sasaran adalah :

1. **Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum.**
2. Indeks Infrastruktur Pendidikan.
3. Indeks Infrastruktur Kesehatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu pengampu untuk mecapai target kinerja Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum tersebut di atas.

Dinas Perhubungan sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah kabupaten Sidoarjo berusaha menyelaraskan program kegiatan yang menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo dengan meningkatkan pelayanan dibidang perhubungan serta ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, terminal, lahan parkir yang layak, termasuk uji kelayakan kendaraan angkutan umum serta tercukupinya sarana PJU . penyelenggaraan urusan perhubungan ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Program pembangunan untuk urusan Perhubungan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penyelengaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Pengelolaan Pelayaran;
3. Program Pengelolaan Perkeretaapian;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota



Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut dan permasalahan pembangunan untuk urusan perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah:

**“ Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur ”**

terkait dengan upaya Peningkatan pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau serta pelayanan PJU yang mencakup wilayah kabupaten.

Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah transit dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, memerlukan layanan transportasi yang berkualitas.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut :

**1. Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik**

Indikator ini menggambarkan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat baik dalam pelayanan pengujian maupun sarana penunjang transportasi darat.

Dari hasil capaian indikator Prosentase sarana dan Prasarana Layanan dan Penunjang Perlengkapan kondisi baik tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa peningkatan pelayanan, antara lain:

1. Memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan wajib uji 1 ( satu ) bulan sebelum habis masa berlaku;
2. Adanya pelayanan Drive thru bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji KIR;
3. Melakukan uji keliling terhadap kendaraan wajib uji;
4. Peningkatan pelayanan terminal tipe C salah satunya melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Disamping itu Dinas Perhubungan juga melakukan beberapa Upaya untuk meningkatkan jumlah kendaraan yang lulus uji kelayakan diantaranya :

- 1) Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan dan SDM;
- 2) Dilakukan kalibrasi alat uji setiap 1(satu) tahun sekali oleh Dirjen Perhubungan.

- 3) Meningkatkan pengawasan yang lebih teliti dalam pelaksanaan uji KIR, sehingga kendaraan wajib uji yang lulus uji KIR benar – benar sesuai standart kelulusan;
- 4) Melakukan kegiatan operasi lalulintas di jalan wilayah kabupaten Sidoarjo.
- 5) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan ke warga tentang pentingnya keselamatan baik di jalan raya ataupun di alur sungai

## **2. Prosentase Perlengkapan Jalan Kondisi Baik**

Indikator ini menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan dalam berlalulintas di wilayah kabupaten sidoarjo.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat di Sidoarjo antara lain :

- 1) Melakukan penambahan perlengkapan jalan yang belum ada ;
- 2) Melakukan revitalisasi alat perlengkapan jalan serta upgrade sehingga bisa menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

#### **A. Bidang Lalu Lintas**

Tupoksi Bidang Lalu Lintas meliputi moda lalu lintas jalan, jaringan rel, sungai dan penyeberangan. Peranan yang paling besar dari Bidang Lalu Lintas saat ini adalah pada moda lalu lintas jalan.

Angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat besar untuk angkutan di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo, yaitu antar kecamatan, dalam ibukota kabupaten, maupun antar wilayah kabupaten/kota. Baik itu dengan moda kendaraan angkutan umum maupun moda angkutan kendaraan pribadi. Kondisi jalan di Kabupaten Sidoarjo pada umumnya cukup baik, namun pertumbuhan pengguna jalan yang dikarenakan bertambahnya mobil pribadi dan sepeda motor tidak seimbang dengan perluasan dan pertambahan jalan sehingga sehingga Kepadatan lalu lintas dan kemacetan merupakan masalah utama di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa jalan antar kota yang mempunyai kepadatan cukup tinggi antara lain terjadi di ruas Porong sebelah selatan Sidoarjo. Dan di ruas Gedangan di sebelah utara Sidoarjo

Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, salah satu alternatif

solusinya adalah dengan rekayasa lalu lintas angkutan darat. Isu-isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan Bidang Lalu Lintas di Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Wilayah kabupaten Sidoarjo sebagai penyangga ibukota propinsi dan pertumbuhan jalur transportasi akibat bangkitan-bangkitan ekonomi sehingga kepadatan lalulintas perlu penanganan yang serius ;
2. Belum terciptanya sistem angkutan umum massal yang ideal sehingga masyarakat enggan menggunakannya;
3. Belum terintegrasinya antar dan inter moda;
4. Masih adanya persimpangan sebidang, sehingga angka kecelakaan pada persimpangan ini masih cukup tinggi;
5. Masih kurangnya sarana prasarana jalan dalam mendukung percepatan pertumbuhan penduduk, jumlah kendaraan maupun pembangunan (traffic laight, rambu, marka jalan dsb);
6. Pengelolaan perparkiran yang masih belum optimal;
7. Belum adanya fasilitas jaringan jalan bagi pengendara sepeda pancal;

## **B. Bidang Angkutan**

Tupoksi Bidang Angkutan lebih dititik beratkan pada sisi pembinaan perusahaan angkutan darat, sungai dan kereta api dengan tujuan pelayanan publik disamping untuk mendapatkan profit.

Bidang Angkutan mempunyai peranan besar untuk pembinaan perusahaan angkutan darat dalam kabupaten dan antar wilayah dalam propinsi. Pembinaan perusahaan angkutan darat meliputi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan evaluasi kerja operasional pelayanan angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan barang dan bahan berbahaya, angkutan rel, dan angkutan sungai. Serta memberikan izin trayek dan izin usaha angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan pariwisata, angkutan barang, dan bengkel umum kendaraan bermotor.

Untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas, salah satu alternatif utama adalah mengembangkan sarana dan prasarana angkutan darat serta berusaha menciptakan angkutan umum massal yang aman, nyaman, lancar, murah, terjangkau, dan terjadwal sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadinya dan berpindah menggunakan angkutan umum massal dalam mobilitas kegiatan sehari-harinya.

Isu-isu strategis dan permasalahan Bidang Angkutan di Kabupaten Sidoarjo adalah :

1. Adanya kebijakan kepemilikan kendaraan umum dari perorangan menjadi badan hukum sesuai PP nomor 74 tahun 2014 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan;
2. Kondisi kendaraan angkutan umum banyak yang sudah tidak layak jalan sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan jasanya;
3. Adanya kemudahan kepemilikan sepeda motor sebagai sarana transportasi;
4. Perlengkapan lalu lintas angkutan jalan di berbagai titik di wilayah Kabupaten Sidoarjo sulit dimonitor kondisinya karena keterbatasan dana dan SDM;
5. Adanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau bangkitan ekonomi sebagai dampak pembangunan.

### **C. Bidang Penerangan Jalan Umum**

Tupoksi Bidang Penerangan Jalan Umum lebih dititik beratkan pada pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan terutama Penerangan jalan Umum dengan tujuan sarana dan prasarana perhubungan akan tercukupi dan berfungsi dengan baik.

Bidang Penerangan Jalan Umum mempunyai peranan besar dalam mencukupi kebutuhan maupun dalam segi pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana fungsi Bidang Penerangan jalan Umum yakni: penyusunan kebijakan teknis penerangan jalan umum, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis penerangan jalan umum, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penerangan jalan umum ,pelaporan kinerja bidang penerangan jalan umum, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

Isu-Isu strategis dan permasalahan Penerangan Jalan Umum adalah :

1. Wilayah Sidoarjo sebagai penyangga ibukota propinsi menjadi bangkitan ekonomi menjadikan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan perumahan di kabupaten Sidoarjo sehingga kebutuhan sarana jalan termasuk Penerangan Jalan Umum.

2. Kebutuhan Penerangan Jalan Umum sebagai sarana masyarakat dalam melakukan aktifitas di malam hari untuk kenyamanan sekaligus keamanan khususnya di wilayah kabupaten Sidoarjo,
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penerangan jalan umum sehingga perlu peningkatan baik dari segi SDM maupun perlengkapannya.

#### **D. Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan**

Tupoksi Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan lebih dititik beratkan pada sisi pengendalian dan bimbingan keselamatan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan mempunyai fungsi : menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan, mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan. Melaporkan pelaksanaan tugas fasilitas pelayanan umum bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan.

Isu-Isu strategis dan permasalahan Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan adalah :

1. Sarana dan prasarana serta fasilitas utama dan penunjang keselamatan pada bidang perhubungan sangat minim;
2. Lingkup tugas yang sangat besar dan luas sementara kualitas dan kuantitas SDM dan anggaran sangat terbatas;
3. Masih tingginya angka kecelakaan baik di darat, laut, dan udara, terutama angka kecelakaan pada angkutan darat.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Dalam Review terhadap rancangan awal merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026 seperti yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026 yang dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan. Disamping itu Dokumen Rencana Kerja juga memuat Program Kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dengan demikian akan dapat diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Selain merencanakan kegiatan dengan mekanisme Top Down, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan perencanaan pembangunan secara Bottom Up melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) baik tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan maupun tingkat Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat kabupaten Sidoarjo tentang pembangunan di daerahnya

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo yang *merupakan satu kesatuan* dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan urusan Perhubungan merupakan urusan yang konstribusinya terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten cukup penting, khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam sektor perhubungan darat, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, terminal dan lahan parkir yang layak, Terpenuhinya Penerangan jalan Umum dan uji kelayakan kendaraan angkutan umum. Penyelenggaraan urusan perhubungan ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan perhubungan tergambar pada pencapaian sasaran kinerja daerah

- 1. *Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan***
- 2. *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan***

utamanya terkait dengan upaya Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan. Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah transit dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, memerlukan layanan transportasi yang berkualitas serta terpenuhinya sarana Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sasaran merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai secara

nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan terukur dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana berikut :

1. Tujuan :

- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur Perhubungan.

**Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024**

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023, antara lain :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan Indikator :

- Persentase alat penerangan jalan yg layak fungsi
- Tingkat konektivitas jaringan jalan
- Rasio peningkatan fasilitas pelengkap jalan
- Cakupan pelayanan angkutan umum

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator :

- Nilai SAKIP
- Nilai Indeks RB
- Nilai SKM
- Nilai IPP



### 3.3 Program dan Kegiatan

#### Program Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		2.2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		2.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		2.4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		2.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		2.6 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
		2.7 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
		2.8 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang PerseoranganWarga Negara Indonesia atau Badan Usaha

		Kewenangan Kabupaten / Kota
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	4.1 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **BAB. IV**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- **Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2024 serta Tolak Ukur Kinerja Sasaran**

Lampiran Tabel Renja 2024



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja -PD) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini sebagai acuan program kegiatan dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kabupaten Sidoarjo.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang perhubungan terutama lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur.

Sidoarjo, Juni 2023

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sidoarjo



**BENNY AIRLANGGA .Y. SH.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690220 199403 1 005